

Peran Sektor Pertanian Dalam Menghadapi Kesenjangan Perekonomian Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Role of agricultural sector in facing economic disparity In the special province of yogyakarta

Arif Wahyu Widada¹, Jangkung Handoyo Mulyo¹ & Muh Amat Nasir²

¹ Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, UGM

² Mahasiswa Pascasarjana PS Ekonomi Pertanian, UGM

email: arif.w.widada@ugm.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indikator ini sebaiknya tidak hanya naik tetapi juga harus merata pada wilayah di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui lebih lanjut kontribusi sektor pertanian dalam PDRB di DIY, serta (2) mengetahui peranan sektor pertanian dalam menghadapi kesenjangan perekonomian di DIY. Penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi beberapa variabel dari tahun 2001-2018. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi tabel, menghitung indeks williamson, paired t-test, dan regresi OLS sederhana. Hasil penelitian mengungkap bahwa sektor pertanian mempunyai kontribusi terhadap PDRB DIY yang semakin menurun. Terdapat peningkatan kesenjangan pendapatan daerah atau pertumbuhan perekonomian antar kabupaten/kota di DIY. Sektor pertanian secara signifikan terbukti memberikan dampak pada penurunan indeks williamson yang berarti semakin besar kontribusi sektor pertanian pada PDRB kabupaten/kota, maka pertumbuhan perekonomian antar wilayah di DIY semakin merata. Dalam hal lain, sektor pertanian dapat menurunkan kesenjangan perekonomian antar kabupaten/kota di DIY.

Kata kunci: *indeks williamson, kesenjangan perekonomian wilayah, PDRB, sektor pertanian*

ABSTRACT

GRDP (Gross Regional Domestic Product) growth is one indicator of economic growth in a region. This indicator should not only rise but must also be evenly distributed in the surrounding area. This study aims to (1) further investigate the contribution of the agricultural sector in the GRDP in DIY, and (2) determine the role of the agricultural sector in dealing with economic disparity in DIY. This study used secondary data covering several variables from 2010-2018. The analytical tool used was table description analysis, calculated Williamson index, paired t-test, and simple OLS regression. The results of the study reveal that the agricultural sector has a declining contribution to the GRDP in DIY. There is an increase in regional income gaps or economic growth between districts/cities in DIY. The agricultural sector is significantly proven to have an impact on the decline in the Williamson Index, which means that the higher the contribution of the agricultural sector to the district/city GRDP, the economic growth between regions in DIY is more evenly distributed. In other cases, the agricultural sector can reduce economic disparities between districts/cities in DIY.

Keywords: *indeks williamson, regional economic disparity, GRDP, agricultural sector*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi sektor yang bergerak dari peran subsisten menjadi peran komersial hingga akhirnya menjadi sektor yang diprioritaskan dalam proses pembangunan (Manago *et al*, 2014). Pembangunan perekonomian dalam suatu regional didukung oleh sumber daya alam, manusia, dan finansial yang tercermin dalam berbagai sektor dalam susunan pendapatan daerah. Pertanian menjadi sektor yang cukup dominan berada pada susunan sistem perekonomian di berbagai negara terutama Indonesia, dimana pertanian dapat menjadi mesin penumbuh ekonomi (Awokuse *et al*, 2015).

Pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah bisa jadi tidak memiliki performa yang sama. Hal ini akan menghadapi pada permasalahan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di dalam satu daerah administrasi pemerintahan (Vo *et al*, 2019). Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator kinerja pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan PDRB. Peningkatan nilai PDRB menjadi sangat penting tetapi bukan satu-satunya. Perekonomian haruslah mengalami pertumbuhan tetapi juga harus merata antar wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan pertumbuhan perekonomian. Kesenjangan pertumbuhan perekonomian menandakan adanya pusat pertumbuhan ekonomi yang hanya terpusat di suatu wilayah, sehingga kemanfaatannya hanya akan dirasakan pada wilayah yang sempit dan spesifik. Akhirnya akan berdampak pada rendahnya kesempatan kerja dan penurunan pendapatan masyarakat serta peningkatan kemiskinan. Penurunan kesejahteraan juga dapat mengganggu status ketahanan pangan masyarakat (Widada *et al*, 2017). Yang paling parah, peningkatan ketimpangan perekonomian dapat meningkatkan *moral hazard* (Williamson, 2017).

Perhitungan yang paling umum digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan atau pertumbuhan perekonomian antar wilayah adalah Indeks Williamson seperti yang digunakan untuk mengetahui keseimbangan perekonomian dari efek kebijakan desentralisasi (Lamba *et al*, 2019). Indeks Williamson dapat digunakan untuk mengetahui pemerataan kondisi perekonomian antar wilayah dalam suatu kawasan yang sedang dikaji (Soebagyo *et al*, 2019).

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan perekonomian yang baik yaitu positif di atas 5,2% pada tahun 2018 (BPS, 2019). Tentu saja pertumbuhan perekonomian ini juga harus dilihat lebih dalam bagaimana sektor-sektor penyusunnya bekerja. Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan

yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, semakin baik tingkat kesejahteraannya (Ufuk *et al*, 2018).

Masih pentingnya sektor pertanian pada sistem perekonomian di DIY, maka peneliti melalui penelitian ini ingin mengetahui perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui perkembangan kesenjangan perekonomian antar kabupaten/kota di DIY dengan bantuan indeks williamson. Terakhir, peneliti ingin mengetahui melalui beberapa tes statistik dan model regresi sederhana untuk membuktikan peran sektor pertanian dalam menghadapi kesenjangan perekonomian antar kabupaten/kota di DIY.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di tahun 2019 dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan diambil dari BPS Provinsi DIY dan juga level kabupaten/kota meliputi jumlah penduduk dan PDRB berdasarkan lapangan usaha ADHK tahun 2001-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di DIY, serta Indeks Williamson untuk menghitung ketimpangan pertumbuhan perekonomian antar kabupaten di DIY.

Indeks Williamson menggunakan nilai PDRB perkapita tiap kabupaten/kota, ukuran Indeks Williamson (koefisien variasi tertimbang). Metode ini mempunyai keunggulan karena diberi bobot dengan jumlah penduduk masing-masing kecamatan terhadap total penduduk DIY.

Perhitungan Indeks Disparitas Williamson ini merupakan koefisien variasi PDRB Perkapita yang diberi penimbang proporsi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk DIY dan dirumuskan pada persamaan 1 (Sjafrizal, 2012):

$$IW = \frac{1}{\bar{Y}} \sqrt{\left[\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y}) \right]^2 \frac{P_i}{P}} \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB perkapita kabupaten/kota ke – i
- Y = Rata-rata PDRB perkapita DIY
- P_t = Jmlah penduduk kabupaten/kota ke – i
- P = Jumlah penduduk DIY

Lebih lanjut kontribusi sektor pertanian dalam menghadapi kesenjangan perekonomian di DIY menggunakan dua analisis statistik yaitu *Paired t-Test* dan regresi OLS sederhana. Persamaan uji *Paired t-Test* adalah sebagai berikut pada persamaan 2 (Riduwan & Sunarto, 2013):

$$t = \frac{IW_{pert} - IW_{nonpert}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left(\frac{S_1}{n_1}\right) \left(\frac{S_2}{n_1}\right)}} \dots\dots\dots(2)$$

dimana:

- t = nilai *Paired t-Test*
- IW_{pert} = rerata Indeks Williamson termasuk sektor pertanian
- IW_{nonpert} = rerata Indeks Williamson tanpa sektor pertanian
- S₁² = varians sampel 1
- S₂² = varians sampel 2
- S₁ = simpangan baku sampel 1
- S₂ = simpangan baku sampel 2
- r = korelasi dua sampel
- n₁ = jumlah sampel 1
- n₂ = jumlah sampel 2

Kesimpulan diambil bila hasil uji *Paired t-Test* adalah signifikan, maka terjadi perbedaan secara nyata antara Indeks Williamson dengan dan tanpa memasukkan Sektor Pertanian sebagai penyusun PDRB DIY. Nilai koefisien t yang negatif memberitahukan bahwa IW_{nonpert} lebih besar yang berarti pertumbuhan perekonomian di DIY tanpa melibatkan sektor pertanian juga akan memperbesar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota.

Untuk membuktikan lebih lanjut peran sektor pertanian dalam menghadapi kesenjangan perekonomian di DIY digunakan Regresi OLS sederhana. Model yang digunakan persamaan 3 sebagai berikut:

$$IW = \alpha + \beta Agr_i \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

- IW = Indeks Williamson
- α = konstanta
- β = koefisien regresi

Agr_i = kontribusi sektor pertanian tahun ke-i terhadap PDRB tahun ke-i (%)

Hipotesis yang diberikan adalah sektor pertanian berperan dalam mengurangi kesenjangan perekonomian di DIY. Maka, bila β signifikan dan bertanda negatif (-), dapat diketahui lebih lanjut bahwa penambahan kontribusi sektor pertanian pada PDRB setiap kabupaten/kota di DIY akan berpengaruh terhadap penurunan Indeks Williamson. Keadaan ini berarti sektor pertanian berperan dalam menurunkan tingkat ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota di DIY.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Pembangunan perekonomian suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sementara itu, pembangunan ekonomi suatu daerah tidak selalu diikuti oleh pemerataan yang disebabkan oleh perbedaan potensi ekonomi maupun strategi kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh setiap pemerintah daerah (Loizou *et al*, 2019).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbagi atas beberapa wilayah dengan karakteristik yang berbeda yakni empat kabupaten meliputi Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman, serta satu kota madya yakni Kota Yogyakarta, dengan luas wilayah mencapai 3.185,80 km² atau sekitar 0,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Perbedaan karakteristik wilayah tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

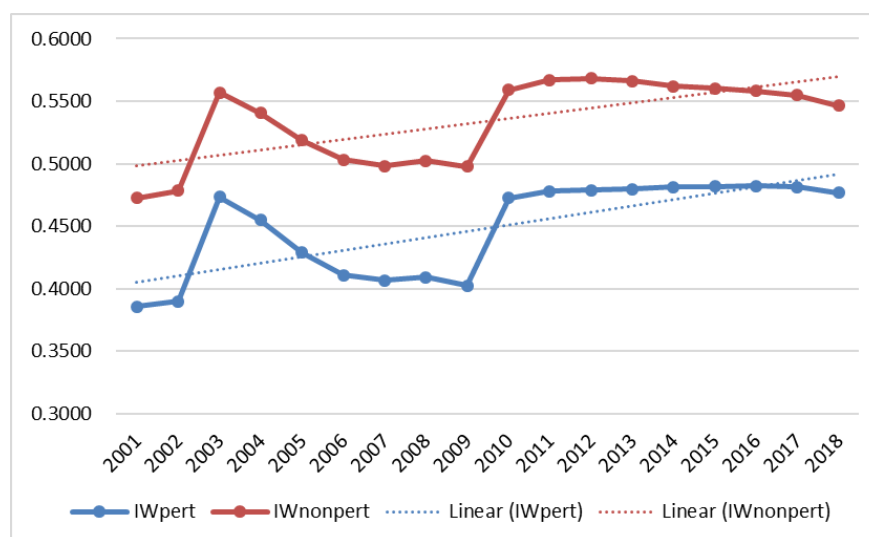
Ketimpangan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat berperan dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, potensi sektor ekonomi tersebut dinilai tidak terdistribusi merata di setiap daerah sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Adapun tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan potensi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disajikan pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1., diketahui bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2001 hingga 2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun

2003 dan 2010, tingkat ketimpangan antar daerah meningkat cukup besar yakni sekitar 0,084 dan 0,070 poin dimana Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul merupakan daerah dengan nilai PDRB paling rendah. Selain itu, di tahun 2003 Kabupaten Gunungkidul menjadi daerah dengan laju pertumbuhan PDRB terendah yakni sekitar 2,08 persen. Secara geografis, Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah paling besar

mencapai 1.485,36 km² atau sekitar 46,62 persen dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian, kegiatan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul dinilai cukup terbatas dikarenakan kondisi lahan yang cukup marginal dan permasalahan kekeringan yang terjadi setiap tahun sehingga banyak penduduk Gunungkidul yang bekerja di kabupaten lain.



Gambar 1. Perbandingan Indeks Williamson dengan dan tanpa menyertakan sektor pertanian pada PDRB DIY Tahun 2001-2018.

Sumber: Analisis data sekunder, 2019.

Tingkat ketimpangan pada kategori PDRB tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih besar dibandingkan kategori PDRB total. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan dalam penurunan tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peranan sektor ekonomi tersebut dinilai cukup besar terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul sehingga mampu meningkatkan pemerataan distribusi PDRB setiap daerah. Hal tersebut dikarenakan, secara geografis pusat pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpusat di beberapa daerah yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan sektor unggulan berupa penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, dan jasa pendidikan.

Peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

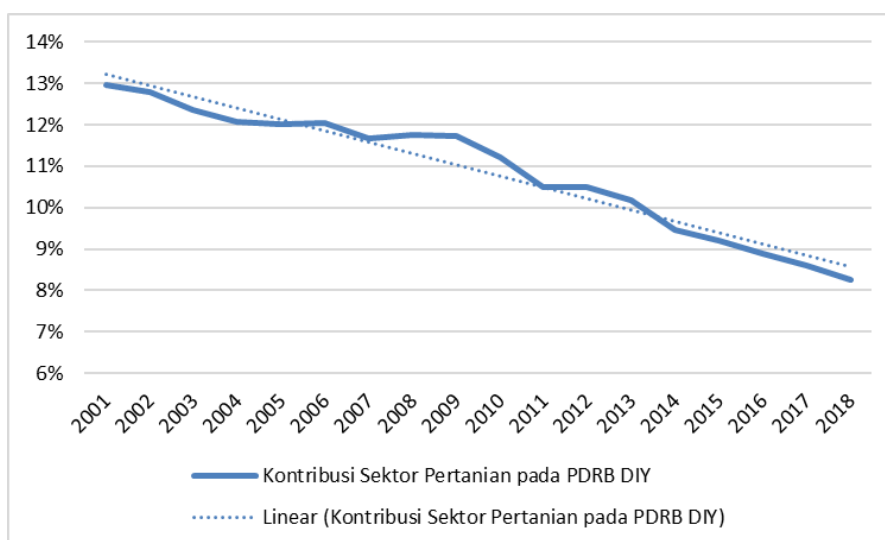
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 8,26 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS,

2019). Jenis tanaman yang paling penting diusahakan dalam sub sektor pertanian di wilayah tersebut ialah tanaman padi. Pada tahun 2018, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 497.599 ton dimana sekitar 33,77 persen dihasilkan oleh Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, perkembangan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada Gambar 2.

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2001 hingga 2018 cenderung mengalami penurunan dengan proporsi terbesar terjadi pada tahun 2011 dan 2014 yakni sebesar 0,71 persen dan 0,72 persen. Penurunan kontribusi sektor ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti luasan lahan pertanian yang semakin berkurang dimana pada tahun 2011 terjadi penurunan luasan lahan sawah irigasi sekitar 1.172 Ha atau sekitar 2,40 persen dibandingkan tahun 2010. Selain itu, penurunan kontribusi juga disebabkan oleh jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang

semakin menurun, karena secara struktural diketahui bahwa sektor ekonomi tersebut dinilai

memiliki tingkat ketidakstabilan yang tinggi terhadap harga dan pendapatan.



Gambar 2. Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB DIY Tahun 2001-2018
 Sumber: Analisis data sekunder, 2019.

Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo merupakan daerah dengan laju penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar yakni mencapai 7,88 persen dan 6,97 persen terhadap PDRB kabupaten dari periode 2001 hingga 2018. Beberapa faktor penurunan kontribusi sektor ekonomi tersebut ialah alih fungsi lahan terutama di Kabupaten Gunungkidul yang disebabkan oleh tekanan jumlah penduduk. Selain itu, isu mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi suatu permasalahan di Kabupaten Gunungkidul yang salah satunya disebabkan oleh

lambannya implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor ekonomi yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, peranan sektor ekonomi tersebut terhadap penurunan ketimpangan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2001 hingga 2018 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Paired Samples Test

Model	Mean	df	t-statistic	Sig. (2-tailed)
$IW_{pert} - IW_{nonpert}$	-0,085	17	-50,896***	0,000
IW_{pert}	0,449			
$IW_{nonpert}$	0,534			

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2019

Keterangan:

*** : signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($\alpha=0,01$)

Rerata tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan nilai indeks williamson pada PDRB total dan PDRB tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan secara berurutan ialah 0,449 dan 0,534. Hal tersebut menandakan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan secara signifikan mampu menurunkan tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,085 pada periode 2001 hingga 2018. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil analisis statistik beda dua rerata yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Indeks Williamson

dengan dan tanpa menyertakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tanda negatif (-) yang melekat pada koefisien menunjukkan bahwa Indeks Williamson dengan menyertakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bernilai lebih rendah dibandingkan dengan tanpa menyertakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kata lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperbaiki pemerataan pertumbuhan perekonomian antar wilayah di DIY.

Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul merupakan daerah yang sangat tergantung

terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor ekonomi unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah dimana sekitar 58,14 persen lahan sawah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di ketiga kabupaten tersebut. Sektor ekonomi tersebut mampu menurunkan tingkat ketimpangan dengan daerah lain terutama Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai pusat ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor ekonomi yang sangat menunjang

pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian, kontribusi sektor ekonomi tersebut cenderung mengalami penurunan pada periode 2001 hingga 2018 yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan luasan lahan pertanian dan produktivitas tenaga kerja yang semakin berkurang. Sementara itu, pengaruh kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap penurunan tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Regression Test

Model	Expected sign	Coefficients	t-statistic	Probability
Constant	+	0,657***	14,741	0,000
Agr	-	-1,911***	-4,716	0,000
Adj. R-squared				0,555
F-statistic				22,243***
Prob (F-statistic)				0,000

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2019

Keterangan:

*** : signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($\alpha=0,01$)

Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi terhadap tingkat ketimpangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara signifikan pada tingkat kepercayaan sebesar 99 persen. Selain itu, penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan meningkatkan ketimpangan daerah sebesar 1,911. Atau dengan kata lain, secara statistik terbukti bahwa sektor pertanian memiliki peran yang signifikan dalam menghadapi kesenjangan perekonomian antar kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kinerja sektor ekonomi tersebut diharapkan dapat ditingkatkan dan dijaga untuk menurunkan ketimpangan antar daerah melalui berbagai kebijakan seperti perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), mekanisasi dan peningkatan minat tenaga kerja muda dalam sektor tersebut.

KESIMPULAN

Sektor pertanian masih menjadi sektor andalan di DIY. Akan tetapi, sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin menurun terhadap PDRB karena sektor lain memiliki pertumbuhan yang lebih agresif. Pertumbuhan perekonomian di DIY semakin tidak merata antar kabupaten/kota yang dibuktikan dengan semakin besarnya Indeks Williamson DIY. Hasil penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang berkontribusi untuk memperlambat laju kesenjangan perekonomian di DIY. Semakin besar kontribusi sektor pertanian, maka semakin

rendah kesenjangan pertumbuhan perekonomian antar kabupaten/kota di DIY.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Pertanian UGM yang telah memberikan fasilitas bantuan pendanaan riset dengan skema Hibah Dosen Muda Fakultas Pertanian UGM. Dana tersebut kami manfaatkan untuk mengembangkan riset berdasarkan kepakaran, bidang studi dan laboratorium untuk meningkatkan kompetensi dan publikasi terutama bagi Dosen Muda Fakultas Pertanian UGM pada Departemen Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Awokuse, T. O., & Xie, R. (2015). Does agriculture really matter for economic growth in developing countries? *Canadian Journal of Agricultural Economics*, 63(1), 77–99. <https://doi.org/10.1111/cjag.12038>
- BPS. (2019). *Yogyakarta Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Karas, E., & Selen, U. (2018). Refah İktisadi Kapsamında Sosyal Refah ve Vergileme İlişkisi: Türk Gelir Vergisinin Değerlendirilmesi. *Business and Economics Research Journal*, 9(4), 979–993. <https://doi.org/10.20409/berj.2018.150>
- Lamba, A., Allo, P. K., & Lamba, R. A. (2019). Effect of fiscal decentralization policy of

- regional economic imbalances towards economy growth in Eastern Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 112–127. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n2.298>
- Loizou, E., Karelakis, C., Galanopoulos, K., & Mattas, K. (2019). The role of agriculture as a development tool for a regional economy. *Agricultural Systems*, 173, 482–490. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.04.002>
- Manago, A. M., Greenfield, P. M., Kim, J. L., & Ward, L. M. (2014). Changing cultural pathways through gender role and sexual development: A theoretical framework. *Ethos*, 42(2), 198–221. <https://doi.org/10.1111/etho.12048>
- Riduwan, & Sunarto. (2013). *Pengantar statistika untuk penelitian pendidikan, sosial, ekonomi, komunikasi, dan bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soebagyo, D., Fahmy-Abdullah, M., Sieng, L. W., & Panjawa, J. L. (2019). Income inequality and convergence in Central Java under regional autonomy. *International Journal of Economics and Management*, 13(1), 203–215.
- Vo, D., Nguyen, T., Tran, N., & Vo, A. (2019). What Factors Affect Income Inequality and Economic Growth in Middle-Income Countries? *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 40. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010040>
- Widada, A. W., Masyhuri, M., & Mulyo, J. H. (2017). Determinant Factors of Food Security in Indonesia. *Agro Ekonomi*, 28(2), 205. <https://doi.org/10.22146/jae.26245>
- Williamson, J. (2017). The Costs of GDP-Linked Securities. In *Growth-Linked Securities* (pp. 65–70). https://doi.org/10.1007/978-3-319-68333-1_5